

BAB III
PEMBAHASAN
EFEKTIVITAS REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN DESA
TANGGULANGIN TAHUN 2015

Terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah itu tidak terlepas dari peranan keberhasilan Otonomi dan Desentralisasi suatu Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. salah satu aspek dari pemerintahan Daerah yang harus diatur secara Hati-Hati adalah masalah pengelolaan keuangan Daerah dan Anggaran Daerah.

Seperti sudah diketahui, Anggaran Daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dan Desa dalam bentuk uang (rupiah) dalam suatu periode tertentu (satu tahun). Langkah yang diambil Pemerintah Desa Tanggulangin dalam pelaksanaan pembangunan salah satu faktor keberhasilan yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dana yang diusulkan kantor Desa Tanggulangin kepada APBD Desa Tanggulangin belum terserap sepenuhnya, masih ada beberapa program yang terdiri dari pos-pos tertentu belum terrealisasi, yang disebabkan karena dana yang dialokasi dari APBD Desa Tanggulangin masih jauh dari yang dibutuhkan masyarakat. Peneliti menggunakan teori Martani dan Lubis untuk mengukur keefektivan program dan anggaran Desa Tanggulangin tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber adalah pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Desa Tanggulangin memiliki beberapa permasalahan yang menghambat perkembangan perekonomian masyarakatnya. Adapun kendala tersebut adalah seperti, rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya, sumber daya alam yang kurang mendukung, mental untuk berwirausaha yang masih rendah, nilai-nilai keimanan yang dirasakan masih kurang, hingga alokasi dana sebagai bentuk dukungan dari pemerintah yang dirasakan masih belum mencukupi adalah menjadi permasalahan yang menghambat tujuan untuk mencapai Desa Tanggulangin, yang sukses, demokratis berkepribadian dan agamis.

Adapun besaran alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan potensi APBD Desa Tanggulangin dan Anggaran Kelurahan.

Tabel 3.1**APBD Desa dan Anggaran Kelurahan**

Jumlah Anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp.
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp. 109.320.000
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 110.000.000
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. 40.000.000
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. -
Pendapatan Asli Desa	Rp. 66.050.000
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. -
Alokasi Dana Desa	Rp. 115.532.000
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp. -
Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak meningkat	Rp. -
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp. 440.950.000
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp. 167.520.000

Sumber: Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan

Dari data tabel di atas dapat kita lihat bagaimana alokasi dana dari pemerintah menjadi satu-satunya sumber pendapatan desa. Tidak adanya potensi yang ada dari dana swadaya masyarakat adalah salah satu dampak adanya kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah Desa Tanggulangin.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa Tanggulangin dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

**URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANGGULANGIN KECAMATAN JATISRONO TAHUN ANGGARAN 2015**

Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Pendapatan Desa		
Pendapatan Asli Desa	66.050.000	54.450.000
Hasil Usaha Desa		
Badan Usaha Milik Desa		
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	64.250.000	
Tanah Kas Desa	64.250.000	52.350.000
Pasar Desa		
Pasar Hewan		
Bagunan Milik Desa		
Obyek Rekreasi yang dikelola Desa		
Pelelangan ikan yang dikelola Desa		
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
Biaya Administrasi	1.800.000	2.100.000
Pelepasan Hak atas Tanah		
Penjualan Peralatan Kantor yang Tidak Terpakai		
Penjualan Hasil Penebangan Pohon		
Penjualan Hasil Pertanian		
Penjualan Hasil Perkebunan		
Penjualan Hasil Peternakan		
Penjualan Hasil Perikanan		

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	75.315.000	226.110.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	115.532.000	157.294.000
ADD dari APBN		68.816.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten		152.266.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
Bantuan Keuangan APBD Provinsi	40.000.000	40.000.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten		
Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	110.000.000	
Penghasilan Tetap	109.320.000	105.516.000
Bantuan Kegiatan Posyandu		3.750.000
Bantuan Poskamling		3.000.000
Jumlah Pendapatan	440.950.000	432.826.000
Belanja Desa	440.950.000	432.826.000
Belanja Langsung	244.930.000	211.812.200
Belanja Pegawai	12.035.000	12.730.000
Honorarium Tim/ Panitia	12.035.000	12.730.000
Honor Panitia Musrenbangdes		
Honor Pengelola Anggaran	3.120.000	3.540.000
Honor Sub PPKBD	2.400.000	2.400.000
Honor Petugas Kebersihan	1.200.000	1.200.000
Uang Sidang BPD	3.390.000	3.390.000
Uang Kehormatan BPD	1.925.000	2.200.000
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bahan Pakai Habis	3.152.000	6.076.200

Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000	1.741.200 58.000
Belanja Alat Tulis BPD	400.000	300.000
Belanja Prangko dan Benda Pos lainnya	420.000	420.000
Belanja Bahan Bakar Minyak	432.000	432.000
Belanja Box Salon		2.500.000
Belanja Gelas 15 Lusin		375.000
Belanja Piring 10 Lusin		250.000
Belanja Bahan atau Material	2.500.000	3.000.000
Pensertifikatan Tanah Kas Desa	2.500.000	3.000.000
Belanja Jasa Kantor	660.000	2.160.000
Belanja Listrik	660.000	660.000
Langganan jaringan Internet Desa		1.500.000
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	800.000	800.000
Belanja Jasa Servis	200.000	200.000
Belanja Penggantian Suku Cadang	280.000	280.000
Belanja Bahan Minyak Pelumas	120.000	120.000
Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan	200.000	200.000
Belanja Perawatan Gedung Kantor	1.200.000	3.300.000
Belanja Perawatan Gedung Kantor	1.200.000	1.300.000
		2.000.000
Belanja Perawatan Alat Kantor	1.000.000	1.000.000
Servis Mesin Ketik		
Belanja Perawatan Komputer	1.000.000	1.000.000
Belanja Cetak dan Pengandaan	3.545.600	6.330.000
Belanja Langganan Surat Kabar	903.000	1.080.000
Belanja Cetak Perdes atau Proposal	750.000	750.000

Belanja Cetak/ Fotocopy dan Penjilidan Sertifikat	492.800	500.000
Belanja Cetak Buku Administrasi Rt	1.400.000	
Belanja Peta Desa		4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman	9.305.000	6.800.000
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.755.000	1.950.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Musrenbangdes	1.050.000	250.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemerintah Desa	3.000.000	2.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dusun	2.000.000	800.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD	400.000	
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	600.000	300.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Posyandu dua tempat	500.000	1.000.000
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		4.000.000
Biaya Peningkatan SDM	4.000.000	4.000.000
Penyusunan Profil Desa	2.000.000	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.360.000	8.800.000
Belanja Pakaian Batik Tradisional RT/RW, Ketua LPM, Ketua Karangtaruna Desa-Dusun atau Ketua BPD	1.360.000	7.800.000
Belanja Pakaian Olahraga		1.000.000
Belanja Modal	52.372.400	156.816.000
Pembuatan MCK Kantor Desa	10.000.000	
Rabat Jalan Dusun Geneng RT.03/04	10.000.000	
Saluran Pembuangan Banjir Dampak Air Hujan RT.03/03	8.000.000	13.763.200
Rabat Jalan Dusun Pakel RT.01/01	10.000.000	
Jembatan Deker Dusun Jaten RT.03/03	4.372.400	
Rabat Jalan Dusun Jati RT.01/02	10.000.000	

Rehab Saluran Irigasi Dua Tempat RT.01/03		27.526.400
Talud Jalan RT.01/01		27.526.400
Talud Jalan RT.03/02		40.000.000
Bantuan Sarana Poskamling RT.01/03		3.000.000
SPAL Dusun Jati RT.03/02		15.000.000
SPAL Barat SDn 1 Tanggulangin		10.000.000
Rehab Gedung Balai Desa		10.000.000
Belanja pengadaan Paket Jaringan Internet Desa		10.000.000
Jumlah Belanja Langsung	244.930.000	211.812.200
Belanja Tidak Langsung	196.020.000	223.571.800
Belanja Pegawai	167.520.000	166.716.000
Penghasilan Tetap	167.520.000	166.716.000
Penghasilan Tetap Kepala Desa		
Dari Bantuan APBD	24.060.000	26.244.000
Dari PAD	16.200.000	15.600.000
Penghasilan Tetap Kepala Urusan		
Dari Bantuan APBD	36.540.000	39.636.000
Dari PAD	18.000.000	16.200.000
Penghasilan Tetap Kepala Dusun		
Dari Bantuan APBD	48.720.000	39.636.000
Dari PAD	24.000.000	16.200.000
Tunjangan BPD		13.200.000
Belanja Bantuan Sosial	14.500.000	13.000.000
Bantuan Kepada Lima Posyandu	2.500.000	
Bantuan Empat TPQ	2.000.000	2.000.000
Bantuan Rehab Rumah KK Miskin Dua KK	5.000.000	5.000.000

Bantuan Masjid atau Mushola Dua Unit	5.000.000	6.000.000
Belanja Bnatuan Keuangan	14.000.000	43.855.800
Oprasional RT/RW; 13/4	4.250.000	20.400.000
Oprasional TP.PKK	2.250.000	5.000.000
Oprasional LPM	1.750.000	3.000.000
Oprasional TK/Paud Tiga Unit	1.500.000	1.500.000
Oprasional Hansip/ Linmas	500.000	1.000.000
Karang Taruna Desa	500.000	1.000.000
Klub Olah Raga Empat Klub	2.000.000	2.000.000
Pembentukan BPD		
Oprasional Posyandu		3.750.000
Bantuan Jamban Keluarga		5.205.800
Bantuan Kesenian Dua Kelompok	1.000.000	1.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung	196.020.000	223.571.800
Jumlah Belanja	440.950.000	435.384.000

Sumber : Kantor Desa Tanggulangin

Berdasarkan pada tabel di atas peneliti menyimpulkan bahwa adanya beberapa selisih besaran anggaran dari periode sebelumnya dengan periode yang sedang berjalan. Hal ini diakibatkan karena adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Dampak dari perbedaan tersebut adalah penurunan pendapatan asli desa dan juga jumlah belanja langsung yang lebih sedikit, tetapi tidak hanya dipengaruhi oleh turunnya pendapatan asli daerah dan jumlah belanja langsung saja namun selisih besaran anggaran juga disebabkan adanya beberapa point anggaran yang mengalami penambahan seperti alokasi dana desa dan alokasi belanja tidak langsung. Untuk melengkapi data peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait juga melakukan penelusuran kerumah warga guna mendapatkan informasi yang seluas-luasnya diantaranya berkaitan dengan :

1. Efektivitas

Adapun yang menjadi tujuan adanya target Efektivitas program dan anggaran di desa tanggulangin adalah dalam rangka bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan juga sebagai wujud pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan visi dan misi. Selain itu juga bertujuan untuk merangkul masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Tanggulangin, seperti hasil wawancara dengan Ibu Marsih selaku Kepala Desa Tanggulangin pada tanggal 5 januari 2017 pukul 9.30 siang.

“Kita selaku pihak pemerintah yang terkait, berdasarkan capaian program desa yang telah ada ingin menggambarkan kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanggulangin.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah desa tanggulangin dengan tujuan dan pencapaian program, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak sesuai dengan visi dan misi yang telah ada, ingin menampilkan peningkatan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat, hal ini diterapkan dengan maksud memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

b. Pendekatan Proses

Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pemerintah desa tanggulangin dengan tujuan dan pencapaian program, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak sesuai dengan

visi dan misi yang telah ada, ingin menampilkan peningkatan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat, hal ini diterapkan dengan maksud memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, adapun programnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintah, asas kepentingan umum, keterbukaan, professional dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan yang professional dibutuhkan adanya dukungan kualitas sumber daya yang ada, baik sarana prasarana, profesionalisme sumber daya daya aparatur maupun kelembagaan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsih pada tanggal 5 januari 2017 pikul 9.30 Yang mengatakan bahwa:

“Terselenggarannya koordinasi unit kerja di wilayah kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai kelurahan paling diutamakan, tentunya untuk menjalin kedekatan agar memperlancar komunikasi serta dalam penyampaian informasi,, juga dengan adanya komitmen bersama antar anggota organisasi untuk mewujudkan kesederhanaan keseharian dan dinas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marsih diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai komunikasi yang baik antar anggota merupakan langkah awal yang baik agar tercapainya pelayanan publik yang optimal, sedang koordinasi untuk setiap program harus dibangun supaya setiap target yang ingin dicapai mudah diraih tepat waktu, selain itu koordinasi antar anggota mempermudah agar informasi yang ada mudah dijangkau.

- b. Meningkatkan pengembangan wilayah menjadi desa yang mandiri, berdaya saing yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya dukungan kualitas sumber daya yang ada, baik sarana prasarana, profesionalisme sumber daya aparatur maupun kelembagaan yang memadai, capaian kinerja sasaran peningkatan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan dapat dilihat dari ketersediaan akses informasi yang mudah didapat dan dokumen yang dihasilkan. Menurut Ibu Marsih yang saya temui di kelurahan pada tanggal 5 januari 2017 pukul 9.30 siang tersebut mengatakan:

“Untuk mencapai tingkat keberhasilan capaian kinerja sasaran ini, perlu ditunjang dengan beberapa faktor kegiatan strategis diantaranya melalui bimbingan teknologi teknis untuk meningkatkan SDM pemerintah desa, juga perlu dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas, kemudian pelaksanaan koordinasi yang baik antara pemerintah desa serta dinas instansi terkait.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsih diatas, dapat kita simpulkan bahwa memperbaiki kinerja SDM dengan pelatihan bimbingan merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja yang mumpuni dan berdaya saing. Keunggulan lain adalah agar setiap program terkendali tepat waktu dan agar sasaran peningkatan kualitas prima bagi masyarakat dapat tercapai.

- c. Meningkatkan kenyamanan hidup bagi masyarakat di wilayah tanggulangi dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka memahami berbagai kebutuhan yang telah dikategorikan sesuai prioritas maka dalam mementingkan kebutuhan masyarakat, terkait dengan kesejahteraan hidup telah disusun wewenang dan tanggungjawab masing-masing kepada para perangkat desa dalam bagan organisasi desa tanggulangi. Telah dibahas oleh Ibu Marsih pada tanggal 5 januari 2017 pukul 9.30 siang pada saat itu, seperti ini penjelasannya:

“Untuk kategori kesejahteraan itu usaha yang paling utama ingin dicapai perangkat desa karena dari sana warga bisa menilai berhasil tidaknya tujuan pembangunan namun dari pembangunan pun pasti terdapat kurang lebihnya atau bisa juga dikarenakan faktor tertentu yang menjadikan kendala, seperti di daerah tanggulangi faktor teknis dan non teknis penggunaan sarana dan prasarana kantor, seperti energy listrik yang sering padam, faktor bencana alam maupun pengaruh alam (cuaca) yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang dapat menimbulkan kerusakan pada beberapa sarana dan prasarana penunjang di kantor desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa seorang pejabat yang memimpin dikatakan berhasil apabila hasilnya bisa dirasakan sampai pada warganya, diantaranya meningkatnya pengembangan wilayah, sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa tercukupi, peningkatan kemakmuran dan kenyamanan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban umum serta mampu mengangkat kepentingan umum juga mampu menjadi penggerak sektor-sektor ekonomi.

d. Meningkatkan pelayanan administrasi publik kepada masyarakat.

untuk mendorong anggota organisasi agar tetap konsisten dengan tujuan dan prosedur. Langkah pertama yang harus ada adalah dengan merumuskan perencanaan, seperti yang kita ketahui diantara fungsi perencanaan ialah agar kita dapat melihat perkembangan pencapaian tujuan dengan cara pemantauan dan pengukuran, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap kemungkinan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Agar terhindar dari penyimpangan negatif ketika program berjalan. Karena perencanaan yang kurang matang juga bisa mempengaruhi kepuasan masyarakat mengenai kinerja perangkat desa juga terhadap pelayanan, dimana proses pelayanan publik berjalan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk warga. Ditambahkan dari keterangan Ibu Marsih pada tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 9.30 siang, sebagai berikut penjelasannya:

“Dalam program ini pemerintah desa tanggulangun berusaha memberikan yang terbaik, kerja dengan kewajiban tugas yang sudah dibagi masing-masing namun tetap gotong-royong tidak saling irihati sehingga program dapat berjalan secara efektif sesuai target yang ingin kita capai.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa setiap tanggungjawab yang diperoleh tidak lantas membatasi hati kita untuk tergerak ikut andil dalam membantu anggota lain yang membutuhkan. Bekerja dengan sepenuh hati karena mereka berasal dari masyarakat umum dan bekerja untuk masyarakat umum. Bahwa apa yang mereka usahakan mereka juga yang merasakan hasilnya, semua dikerjakan sesuai kebutuhan dan prioritas bahwa segala yang menjadi kendala kita carikan jalan keluar bersama, apa yang menjadi berat kita carikan jalan agar ada jalan adil untuk membangun bersama.

- e. Meningkatkan kerukunan umat beragama yang dilandasi sikap toleransi yang tinggi.

Landasan serta pedoman bagi kehidupan yang dinamis adalah kerukunan, keamanan serta kenyamanan, terciptanya tenggangrasa antar umat beragama juga kerukunan modal terciptanya kehidupan yang damai, untuk menuju kehidupan yang diharapkan warga desa tanggulangun. Pada tanggal 5 januari 2017 pukul 9.30 siang beginilah Ibu Marsih memberikan penjelasan:

“Karena agama itu adalah hak yang harus di hargai atas perbedaannya, maka pengertian untuk adanya perbedaan harus ditanamkan dalam kehidupan berdampingan antar warga, dengan meningkatkan upaya pengamalan nilai-nilai agama guna mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa unsur agama, hak, kehidupan, dan toleransi tidak boleh terlepas dalam kehidupan berdampingan, yang harus ditanamkan adalah sikap dan moral masyarakat terkait dengan kesadaran individu akan pentingnya kerukunan dan toleransi agar semua berjalan saling menghargai, menghormati sehingga tercipta

kehidupan yang harmonis damai dan sejahtera, untuk itu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing orang tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai guna merajut hubungan yang damai antar agama lain agar silaturahmi terjalin dengan baik dan dari sana membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara banyaknya perbedaan.

c. Pendekatan sasaran

Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

2. Program

Penelusuran dilakukan peneliti pada tanggal 5 januari 2017 pukul 13.00 siang, peneliti berinteraksi dengan beberapa warga sekitar kelurahan Desa Tanggulangin diantaranya adalah ibu Sutini yang merupakan penduduk asli Tanggulangin 39 Tahun beliau mengungkapkan yaitu:

“Terkait dengan program-program pembagunan di desa ini, menurut saya sudah baik dengan adanya program-program dari pemerintah desa guna dalam perbaikan desa, program kegiatan masyarakat juga terkait dengan pelatihan biasanya dijadwalkan rutin dan berjalan terkendali”

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya warga masyarakat cukup merasa puas dengan program pengembangan desa yang ada, warga juga merasa selalu dilibatkan dalam banyak kegiatan yang wujudnya transparan serta membangun. Akan tetapi diantara kelebihan yang adapun tentu terdapat sedikit celah yang warga harapkan agar bisa diperbaiki, diantaranya adalah pembangunan jalan aspal yang kurang tahan lama supaya diperbaiki dengan aspal bakar agar lebih tahan lama karena desa tanggulangin

termasuk desa yang warganya banyak memiliki transportasi berupa truk yang mudah merusak jalan cor jika tidak dibangun dengan aspal bakar.

3. Desa

Kesekretariatan desa

Dalam pemerintahan desa, sekretaris desa sebagai unsur staf dan unsur pelaksana Kepala Desa diantara tugasnya ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tugas selebihnya untuk mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepala urusan juga membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa. Dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan pun juga menjadi bagian yang paling dekat dengan fungsi sekretariatan.

Seperti yang Bapak Sunoko paparkan pada tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 9.30 siang, seperti ini isinya:

“Berbicara mengenai sekretariatan desa atau sekretaris desa yang perannya banyak dalam pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa pada setiap sub bagian, sekretaris desa jugalah yang berfungsi menyiapkan program kerja dan pelaporannya , serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.”

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa peran sekretaris desa sangat berpengaruh dalam pengelolaan roda pemerintahan desa, sekretaris desa jugalah yang berperan melakukan penataan administrasi, mengatur dan mengurus masyarakat, dalam pengkoordinasian anggota, sekretaris desa ditunjuk sebagai alat bantu penyampaian informasi yang diperoleh dari kepala desa kepada anggota, ataupun sebagai penyalur aspirasi dari anggota atau masyarakat yang di tujukan untuk kepala desa dalam rangka pembangunan, bagian terpenting diemban sekretaris desa karena disanalah tolak ukur keberhasilan diperoleh, ketika kemajuan desa sangat tercermin dari bagaimana kemampuan desa dalam mengelola APBDesanya.

4. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bahwa desa merupakan sarana dari semua sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sudah barang tentu setiap permasalahan pembangunan pasti timbul permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur, secara umum permasalahan yang dihadapi desa tanggulangin adalah tidak berbeda dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Permasalahan itu diantaranya ialah mengenai sumber daya alam yang kurang mendukung, faktor alam sangat menentukan perkembangan suatu desa, tanah desa tanggulangin tergolong bukan tanah yang tandus tetapi juga bukan merupakan tanah yang subur sehingga lahan pertanian tersebut kurang maksimal memberikan dukungan kepada pembangunan desa, jadi dengan adanya sub bagian pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat membebentuk sikap mental serta sikap sosial budaya masyarakat desa tanggulangin yang masih kurang mendukung misalnya mental untuk berwirausaha yang masih rendah, semangat berswadaya baik material maupun tenaga dari warga masyarakat yang masih sangat rendah.

Begitu juga pendapat yang bisa saya dapat dari Bapak Sunoko pada tanggal 5 januari 2017 pada pukul 9.30 seperti ini penjelasannya:

“Adapun secara umum atau global yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah desa tanggulangin dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, untuk mencapai desa tanggulangin yang sukses demokratis ber kepribadian dan agamis ialah mengenai potensi tingkat pendidikan yang mayoritas masih redah, kedua adalah faktor keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang perlu di tingkatkan, juga motivasi yang kuat bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai dengan bekerja keras.”

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sangat menentukan bagi hasil pembangunan. Masyarakat tidak saja merupakan tenaga pelaksana dalam pembangunan namun juga sebagai penikmat hasil pembangunan, maka kualitas penduduk mempunyai peran penting, dengan adanya pendidikan maka pengetahuan bertambah dan keterampilan kerja meningkat sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan daya saing yang luas, serta dapat membentuk mental juga pola pikir yang maju, inovatif, terampil dan kritis, berani membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha ataupun mengandalkan kemampuan lainnya untuk berkembang mengigit masyarakat setempatlah yang justru mengetahui yang menjadi permasalahan ataupun potensi desa sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengkoordinasian Pengelolaan Keuangan Desa guna membangun kesejahteraan masyarakat. yaitu salah satu bentuk penyiapan keberhasilan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dengan adanya pengkoordinasian di sub bagian keuangan desa agar dapat membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kemampuan, dan kemandirian masyarakat, adapun diantara fungsi seksi pemberdayaan masyarakat ialah mengkoordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah, diantara fungsi

kedua ialah penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya, juga untuk penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam wawancara disampaikan Bapak Sunoko pada tanggal 5 januari 2017 pukul 9.30 siang:

“Tersusun, terselenggara, dan terlaksana, didalam menyusun harus ada yang dinamakan lues yaitu menerima masukan dan saran agar kegiatan yang akan di laksanakan lebih matang, terselenggara berarti kita memantau kegiatan yang berjalan untuk persoalan apa yang kurang agar bagaimana kedepan kegiatan lebih baik lagi, kemudian terlaksana naaah, berarti sudah berjalan dari sana kita mengambil kesimpulan, memeriksa hasil kerja dan mengkoreksi kekurangan yang ada, pembagian tugas memang sudah ada, masing-masing mengemban tanggungjawab dengan bagiannya tapi gotong-royong selalulah yang menjadikan setiap kegiatan berhasil dicapai pengoordinasian selalu dibutuhkan diawal sebagai katakunci langkah yang harus dilakukan.”

Dapat kita simpulkan hasil wawancara diatas bahwa landasan setiap program akan dibentuk agar berjalan sesuai yang diinginkan dibutuhkan adanya aba-aba, yang dimaksud aba-aba disini adalah pengkoordinasian, mengenai pembagian tugas dan sebagainya yang dapat membantu berlangsungnya program terlaksana dengan baik, yaitu agar membantu mengurangi presentase jumlah penduduk miskin secara bertahap contohnya dengan cara penyuluhan menggalakan masyarakat agar berikir maju percaya diri dan berani untuk membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan atau ber wirausaha.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

Dalam lingkup permasalahan yang dihadapi untuk pembangunan desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya, yaitu karena terbatasnya kualitas sumber manusia serta terbatasnya sarana prasarana daerah. seperti hasil wawancara saya dengan Bapak Sunoko pada tanggal 5 januari 2017 pada pukul 9.30 siang, yang mengatakan:

“Menumbuhkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan, mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar terciptanya generasi penerus yang memiliki pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin ini adalah sedikit cara utama yang kita tekankan, namun terlepas dari itu masalah yang sering dihadapi warga tanggulangun sendiri adalah tentang kurangnya ketersediaan air bersih pada musim kemarau juga pada akses jalan yang menghubungkan antar daerah.”

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara diatas adalah karena SDM yang terbatas keahliannya, dalam upaya membantu pembagunan kesejahteraan. Akses jalan didesa tanggulangun mempunyai peranan penting karena warga tanggulangun yang didominasi buruh dan petani memerlukan jalan yang layak untuk melangsungkan perekonomiannya, jalan raya sebagai penghubung antar daerah untuk menjual hasil pertanian dan sebagai akses jalan roda perekonomiannya, yang menjadi kendala lain adalah mengenai ketersediaan air bersih yang masih susah dijangkau yang berpengaruh pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa tanggulangun.

6. APBDes

Bahwa keberhasilan suatu program pembangunan perlu adanya perencanaan tepat dan terencana, sedang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan skala prioritas pembangunan, artinya mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, dan dapat segera dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat, hal ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat semua potensi desa baik lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, dan semua lapisan masyarakat tanggulangun, adapun diantara yang menjadi sasaran adalah kesejahteraan pembagunan. Berhasilnya perencanaan APBDes dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum adalah terwujudnya peningkatan kapasitas pengembangan infrastruktur pedesaan di desa tanggulangun juga terwujudnya program pengendalian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seperti yang Bapak Sunoko sampaikan pada tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 9.30 beliau menyampaikan:

“Pemeliharaan itu mahal samalahnya dengan perencanaan ia merupakan 70% dari keseluruhan yang orang bisa capai, untuk itu kita wajib berupaya mendapatkan 30% lainnya. Banyak yang sudah kita capai yaitu 70% namun akan tetap 70% dan tidak berarti manakala 30% yang lain kita sia-siakan, maka setiap kegiatan program kita ikuti alur yang sudah direncanakan agar sejalan dengan tujuan sasaran, apa yang sudah menjadi fasilitas umum hendaknya digunakan sesuai kebutuhan juga fungsinya bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya sama-sama menjaga karena itulah hak milik bersama.”

Kesimpulan yang dapat kita petik yaitu bahwa setiap potensi yang dimiliki untuk berkembang dari pemerintah itu ialah fasilitas umum jika rencana pembangunan dari APBDes berhasil tidak akan terasa hasilnya jika apa yang kita dapat tidak bisa kita jaga dan nikmati, dari pemerintah untuk rakyat bukan lantas setiap individu berhak merasa memiliki untuk merusak, kesadaran diri yang benar adalah menanamkan dalam diri hak untuk memiliki fasilitas publik ialah hak memiliki untuk menjaga karena yang membutuhkan manfaatnya orang banyak jika kita merusak dampaknya nasib orang banyak yang kita jadikan korban ke-egoisan kita yang merasa memiliki namun tidak untuk menjaga.

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam memberikan kebebasan juga dalam memberikan perlindungan terhadap hal-hal tertentu merupakan fasilitas yang sudah ada aturannya masing-masing sesuai dengan Pancasila juga berdasarkan undang-undang dasar 1945.

Adapun diantara tugas dan fungsi ini sebagian dari seksi bagian pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ialah melaporkan pelaksanaan penerapan, dan penegakan peraturan perundang-undangan juga dalam pengkoordinasian pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum. Dalam

pandangan Bapak Sunoko yang saya jumpai pada tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 9.30 saat itu, beliau memaparkan:

“Yang perlu dibangun dalam masyarakat desa ialah kesadaran masyarakat akan ketaatan hukum, kesadaran masyarakat yaitu bagaimana masyarakat melibatkan dan menyikapi kondisi saat ini, tentang pencerminan dari sikap masyarakat itu sendiri, mengenai daya nalar, kemampuan berfikir untuk bertindak laku, atau memberlakukan potensi lingkungan yang ada.”

Jadi kesimpulan yang bisa kita petik adalah tentang membangun kesadaran masyarakat akan partisipasi dalam pemeliharaan fasilitas umum, bahwa apa yang diusahakan pemerintah akan sia-sia tanpa kesadaran dan peran masyarakat dalam menjaga, semua berasal dari masyarakat dan akan kembali untuk masyarakat. Tentunya kesadaran masyarakat akan rasa memiliki harus dibangun agar bisa turut menjaga. Peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar manfaat yang disediakan dalam ruang publik yang ada dapat kita rasakan bersama dan kita terima secara maksimal.

Bersamaan dengan pemeliharaan fasilitas umum Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat desa. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian adalah satu paket yang harus dijadikan pekerjaan rumah bagi seksi pelaksana sub pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa, agar terpenuhinya koordinasi kegiatan bidang pemerintahan dalam keberhasilan pembagunan di bidang perencanaan APBDes beserta sub bidang lainnya. Diantara yang menjadi tugas sub bagian pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat desa tanggulangi ini ialah:

Menyampaikan usulan rencana program kegiatan seksi tata pemerintahan sebagai bahan perumusan perencanaan strategis, tugas kedua lainnya ialah menyusun rencana kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan tugas,

permasalahan dan kebijakan yang ada. Yang saya dapat dari Bapak Sunoko pada tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 9.30 siang adalah sebagai berikut:

“Bahwa yang menjadi kesesuaian sasaran dalam arti tepat waktu yaitu adalah adanya tanggung jawab setiap sub bagian seperti tersusunnya program APBDes dan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan lainnya dengan cepat dan akurat, kemudian terpenuhinya koordinasi kegiatan bidang pemerintahan, terlaksananya program kegiatan, juga tersediannya perumusan bahan kebijakan teknis tentang program pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan”.

Dari keterangan Bapak Sunoko tersebut kita dapat simpulkan bahwa langkah koordinasi agar sesuai sasaran adalah dengan menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi ataupun pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, langkah yang akan mengharuskan anggota untuk menjalin komunikasi yang teratur diantara anggota lain agar menghindarkan terjadinya titik persimpangan. Bahwa program dikatakan sesuai jika tepat sasaran, program dikatakan memuaskan jika tepat waktu, memberi kepuasan, juga memberikan dampak perubahan positif untuk pembangunan.

Adapun Analisis Realisasi Anggaran dan Program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tanggulangin mengenai peningkatan pendapatan Anggaran dan Program di Desa Tanggulangin, seperti yang di bawah ini:

Tabel 3.3

Struktur APBDes

Pendapatan Desa	RP. 1.235.019.600
1. PAD	RP. 61.550.000
2. ADD	RP. 409.280.600
3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	RP. 5.000.000
4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	RP. 153.157.000
5. Dana Desa dari APBN	RP. 606.032.000
Belanja Desa	RP. 1.238.297.600
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP. 361.880.600
2. Bidang Pembagunan	RP. 776.110.500
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 54.328.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	RP. 45.978.500

Sumber: Kantor Desa Tanggulangin

Pendapatan Desa : **Rp.1.235.019.600**

Belanja Desa : **Rp.1.238.297.600**

Melihat uraian singkat dari penggunaan ADD pada Desa Tanggulangin, Pendapatan Terbesar diperoleh dari Dana Desa APBN, dan Belanja Bidang Pembangunan menjadi Pengeluaran Terbesar yang jatuh lebih banyak ke Operasional Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Desa khususnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP), pada Pembangunan Infrastruktur pembangunan Talud Jalan serta Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Desa.